

**PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DAN JAWA
TENGAH DALAM MENOLAK KEHADIRAN TIMNAS ISRAEL PADA
FIFA WORLD CUP U-20 TAHUN 2023 DI INDONESIA**

Skripsi

Oleh

**SALSABILA INTANIA
NPM 2016071011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DAN JAWA TENGAH DALAM MENOLAK KEHADIRAN TIMNAS ISRAEL PADA FIFA WORLD CUP U-20 TAHUN 2023 DI INDONESIA

Oleh

SALSABILA INTANIA

Kehadiran Timnas Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah menolak partisipasi Timnas Israel dengan alasan solidaritas terhadap Palestina dan memegang teguh amanat konstitusi Indonesia yang anti-kolonialisme. Sedangkan pemerintah pusat berusaha memenuhi komitmen internasionalnya terhadap FIFA. Adanya keterlibatan pemerintah daerah sebagai aktor subnasional ini menunjukkan bahwa aktor subnasional tidak lagi bersifat pasif, melainkan dapat menjadi kekuatan politik yang memengaruhi arah kebijakan suatu negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penolakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah terhadap isu kedatangan Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia serta menganalisis penolakan tersebut sebagai bentuk paradiplomasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penulis melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta situs web. Konsep yang digunakan adalah konsep paradiplomasi dan subnasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk respon utama aktor subnasional: (1) aksi administratif berupa pengiriman surat langsung kepada pemerintah pusat, (2) pernyataan publik dan resmi yang menegaskan penolakan atas kehadiran Israel, serta (3) negosiasi vertikal dengan pemerintah pusat melalui mekanisme formal maupun tekanan opini publik. Ketiga bentuk tindakan ini memperlihatkan bahwa kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator wilayah, melainkan juga sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi isu internasional.

Kata Kunci: Penolakan, Paradiplomasi, Subnasional, Israel, FIFA, World Cup

ABSTRACT

PARADIPLOMACY OF BALI AND CENTRAL JAVA PROVINCIAL GOVERNMENTS IN REJECTING THE PRESENCE OF ISRAELI NATIONAL TEAM AT THE 2023 FIFA WORLD CUP U-20 IN INDONESIA

By

SALSABILA INTANIA

The presence of Israel's National Team at the 2023 FIFA World Cup U-20 in Indonesia revealed differences in perspective between the central and regional governments. The regional governments of Bali and Central Java rejected the participation of the Israeli National Team, citing solidarity with Palestine and adherence to Indonesia's constitutional mandate of anti-colonialism. In contrast, the central government sought to fulfill their international commitment to FIFA. The involvement of regional governments as subnational actors demonstrates that these actors are no longer passive entities but can serve as political forces capable of influencing the direction of national policy. This research aims to describe the forms of rejection carried out by the provincial governments of Bali and Central Java toward Israel's participation on FIFA World Cup U-20 in Indonesia and to analyze these actions as a form of paradiplomacy. The study employs a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected from secondary sources, including books, academic journals, and credible online publications. The main concepts used are paradiplomacy and subnational actors. The results of this research show that there are three main forms of response from subnational actors: (1) administrative action in the form of sending letters directly to the central government, (2) public and official statements confirming rejection of Israel's presence, and (3) vertical negotiations with the central government through formal mechanisms and pressure from public opinion. These three forms of action show that regional heads not only function as regional administrators but also as political actors who have the capacity to influence international issues.

Keyword: Rejection, Paradiplomacy, Subnational, Israel, FIFA, World Cup

**PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DAN JAWA
TENGAH DALAM MENOLAK KEHADIRAN TIMNAS ISRAEL PADA
FIFA WORLD CUP U-20 TAHUN 2023 DI INDONESIA**

Oleh

SALSABILA INTANIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

Judul Skripsi : **Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah dalam Menolak Kehadiran Timnas Israel pada FIFA World Cup U-20 Tahun 2023 di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Salsabila Intania**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016071011**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Moh. Nizar, S.IP., M.A.
NIP 198308192015041005

Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Moh. Nizar, S.IP., M.A.

Sekretaris

: Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.

Penguji Utama

: Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 November 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Salsabila Intania
NPM 2016071011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Salsabila Intania, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Juliansyah dan Ibu Tanti Yulinda. Penulis mengawali pendidikan formalnya pada Raudhatul Athfal Al-Islamiyah Menggala pada tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 01 Gunung Sakti Menggala pada tahun 2008-2014. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis meneruskan pendidikan di SMP Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Usai menempuh jenjang pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2018.

Usai menyelesaikan pendidikan menengah atas di tahun 2020, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada program studi S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama berkuliah, penulis aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan baik di luar maupun di dalam kampus. Pada tahun 2021, penulis menjadi salah satu panitia pelaksana acara berskala internasional yang diadakan oleh Hubungan Internasional Universitas Lampung dan memegang peranan yang cukup penting sebagai PIC Essay Competition. Tak hanya itu, penulis juga aktif bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJ HI) dengan peranan sebagai anggota divisi Human Resources Development (HRD) pada tahun 2022 dan sebagai Sekretaris Umum 2 pada tahun 2023. Selama tergabung kedalam HMJ HI, penulis aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan.

Penulis juga aktif berkegiatan diluar lingkungan kampus. Salah satunya adalah saat mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Penulis aktif mengikuti program magang pada instansi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung dalam jangka waktu 6 bulan.

MOTTO

“You only have one life to live, make sure it’s yours”

(Eleanor Brown)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(QS Ar Rum: 60)

PERSEMBAHAN

Teruntuk Ayah dan Bunda Tersayang
Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, anugerah, dan ridho-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul *“Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah dalam Menolak Kehadiran Timnas Israel pada FIFA World Cup U-20 Tahun 2023 di Indonesia”* merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mas Moh. Nizar, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala kesabaran, keikhlasan, serta curahan bimbingan, masukan, dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Seluruh kontribusi yang berharga tersebut sungguh menjadi pilar utama dalam proses penulisan skripsi ini;
4. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bimbingan, saran, dorongan, dan energi positif yang tak pernah putus selama proses penulisan skripsi. Dukungan yang diberikan telah menjadi motivasi yang kuat bagi penulis untuk berjuang dan menyelesaikan studi ini dengan hasil terbaik;
5. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan masukan kritis, wawasan baru, serta nasihat dan semangat yang konstruktif demi menyempurnakan skripsi ini agar menjadi karya yang lebih baik dan layak secara akademik;

6. Mas Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas dukungan berkelanjutan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu, membagikan ilmu, dan memberikan bantuan administratif maupun moril kepada penulis sejak hari pertama perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian skripsi;
8. Orang tua penulis, Ayah Juliansyah dan Bunda Tanti Yulinda yang merupakan sumber kekuatan dan inspirasi terbesar penulis. Terima kasih atas cinta, doa, pengorbanan tanpa batas, dan dukungan finansial serta spiritual yang tak pernah berhenti. Doa dan restu Ayah Bunda adalah kunci kesuksesan penulis;
9. Kedua adik penulis, Dzaky dan Devan terima kasih atas canda tawa, pengertian, dan dukungan yang selalu menjadi penyemangat dan hiburan bagi penulis;
10. Keluarga besar penulis, atas dukungan, perhatian, dan doa yang senantiasa mengiringi perjalanan studi penulis dari awal hingga akhir;
11. VVIBU OT 8, Assyabilla Shafura, Btari Yasmin, Dian Claudia, Madelin Agusta, Naura Aisha, Risa Mutia, dan Yolanda Shafna. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan moril yang sudah mewarnai hari-hari penulis dari awal masa perkuliahan hingga saat ini;
12. Rifdah Kamila, sahabat sedari bangku SMP. Terima kasih atas ikatan persahabatan yang tetap terjaga dan selalu memberikan semangat disetiap fase kehidupan;
13. Teman-teman penulis di bangku SMA, Rara, Jijah, Risa, Okti, Adel, Khansa, Rima, Amel, Arlini, dan Andhila. Terima kasih atas kenangan indah dan dukungan tulus yang turut memberikan energi positif;
14. Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hubungan Internasional tahun 2022 dan 2023, terima kasih atas kerja sama, pengalaman berorganisasi, dan kontribusi yang telah membentuk karakter penulis dalam berorganisasi;

15. Mahasiswa HI angkatan 2020, atas solidaritas, bantuan, dan dan dukungan yang membuat perjalanan perkuliahan penulis menjadi lebih berkesan;
16. Para musisi dan seniman, yang lagu-lagunya menjadi teman setia dan penenang pikiran penulis disaat menghadapi kesulitan dan kejenuhan dalam mengerjakan skripsi;
17. Para idol dan aktor, yang senantiasa menjadi hiburan dan pelepas penat disela-sela kesibukan dan tekanan penulisan skripsi;
18. Diri penulis sendiri, Salsabila Intania. Terima kasih karena sudah bertahan, yakin, dan terus berjuang hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 November 2025

Salsabila Intania
NPM 2016071011

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR SINGKATAN..... | v |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Landasan Analitis | 10 |
| 2.2.1 Paradiplomasi | 10 |
| 2.2.2 Subnasional | 15 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 17 |
| III. METODE PENELITIAN | 20 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 20 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 21 |
| 3.3 Sumber Data | 22 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 23 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 24 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 26 |
| 4.1 Respons Kepala Daerah Bali dan Jawa Tengah dalam Menolak Partisipasi Timnas Israel dalam FIFA World Cup U-20 Tahun 2023..... | 26 |
| 4.1.1 Aksi Administratif | 33 |
| 4.1.2 Pernyataan Publik/Resmi..... | 37 |
| 4.1.3 Negosiasi Vertikal | 42 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 4.2 | Analisis Paradiplomasi sebagai Ekspresi Politik Lokal | 45 |
| 4.2.1 | Nilai Dasar Anti-Kolonialisme Bangsa Indonesia | 49 |
| 4.2.2 | Landasan Konstitusional..... | 52 |
| 4.2.3 | Solidaritas terhadap Palestina..... | 55 |
| 4.3 | Implikasi Paradiplomasi Terhadap Diplomasi Nasional | 58 |
| V. | KESIMPULAN DAN SARAN | 62 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 62 |
| 5.2 | Saran..... | 63 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| | LAMPIRAN..... | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikiran..... | 19 |
| Gambar 4.1 Pencabutan Status Tuan Rumah Indonesia..... | 31 |
| Gambar 4.2 Pernyataan Publik Gubernur Bali, I Wayan Koster | 40 |
| Gambar 4.3 Pernyataan Publik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo | 40 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|--|
| AWG | : Aqsa Working Group |
| BDS | : Boycott, Divestment, and Sanction |
| DPD | : Dewan Perwakilan Daerah |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| FIFA | : Federation Internationale de Football |
| FPI | : Front Persaudaraan Islam |
| GNPF | : Gerakan Nasional Pengawal Fatwa |
| IOC | : International Olympic Committee |
| KAA | : Konferensi Asia-Afrika |
| KISIDI | : Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam |
| KNPI | : Komite Nasional Pemuda Indonesia |
| KOI | : Komite Olimpiade Internasional |
| MER-C | : Medical Emergency Rescue Committee |
| MUI | : Majelis Ulama Indonesia |
| OCA | : Olympic Council of Asia |
| OKI | : Organisasi Kerja Sama Islam |
| PAN | : Partai Amanat Nasional |

| | |
|-------|---|
| PDI-P | : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| PKS | : Partai Keadilan Sejahtera |
| PSSI | : Persatuan Sepak Bola Indonesia |
| UEFA | : Union of European Football Associations |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Paradiplomasi merupakan fenomena yang semakin berkembang dalam dinamika hubungan internasional kontemporer. Istilah paradiplomasi merujuk pada keterlibatan aktor subnasional seperti provinsi, negara bagian, atau kota dalam aktivitas yang memiliki dimensi internasional di luar diplomasi resmi pemerintah pusat (Cornago, 2010). Keterlibatan aktor subnasional menunjukkan bahwa hubungan luar negeri tidak lagi menjadi domain eksklusif pemerintah pusat, melainkan juga melibatkan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan, kapasitas, dan identitas politik tersendiri (Cornago, 2018). Keterlibatan aktor subnasional ini mencerminkan kompleksitas tata kelola pemerintahan dalam era globalisasi, di mana batas antara urusan domestik dan internasional menjadi semakin kabur (Cornago, 2010).

Paradiplomasi tidak hanya berkaitan dengan kerja sama lintas batas yang bersifat teknis di bidang ekonomi atau budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana ekspresi politik. Lecours (2008) menjelaskan bahwa paradiplomasi dapat bersifat resistif, yaitu ketika aktor subnasional menggunakan kewenangan administratif atau simboliknya untuk menyampaikan pandangan politik yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak terbatas pada kerja sama ekonomi dan budaya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai ekspresi politik bahkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat (Lecours, 2008). Paradiplomasi menjadi bentuk artikulasi politik lokal yang lahir dari nilai-nilai, identitas, serta ideologi masyarakat yang diwakili oleh pemerintah daerah (Lecours, 2008).

Fenomena ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, khususnya setelah reformasi politik pada tahun 1998 yang membawa perubahan besar melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya dan turut berpartisipasi dalam isu-isu yang memiliki dimensi internasional (Said, 2015). Namun dalam praktiknya, kebijakan daerah tidak selalu berjalan seiring dengan kebijakan pusat. Dalam sejumlah kasus, aktor subnasional dapat menjadi kekuatan yang menantang atau bahkan menghambat implementasi komitmen internasional negara (Keating, 1999). Ketika isu yang dihadapi menyentuh nilai ideologis atau identitas nasional, perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah berpotensi muncul.

Keterlibatan aktor subnasional menjadi penting dalam penyelenggaraan *event* internasional. Keberhasilan atau hambatan suatu kegiatan sering kali bergantung pada dukungan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan administratif dan legitimasi politik di wilayahnya (Criekemans, 2010). Apabila terdapat ketidaksesuaian antara komitmen internasional pemerintah pusat dan aspirasi politik daerah, maka dapat muncul dinamika yang perlu dikelola dengan hati-hati. Salah satu contoh kasus yang memperlihatkan fenomena tersebut adalah isu kehadiran Timnas Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia.

Isu ini berawal setelah Israel resmi menjadi salah satu dari 24 tim yang akan bertanding dalam turnamen yang diselenggarakan di Indonesia tersebut. Timnas Israel dipastikan lolos melalui kualifikasi Piala Eropa U-19 tahun 2023. Hal ini memicu gelombang penolakan dari berbagai aktor subnasional di Indonesia (Purwanto et al., 2023). Secara historis, sikap penolakan terhadap Israel bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada masa Presiden Soekarno, Indonesia menolak bertanding melawan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958 dan menolak memberikan visa bagi kontingen Israel dalam Asian Games 1962. Meskipun keputusan tersebut berujung pada sanksi dari Komite Olimpiade Internasional, langkah itu dianggap konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan (Tumanggor, 2023). Dengan demikian, isu Palestina telah lama menjadi bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia yang berdimensi ideologis dan historis.

Rangkaian kegiatan FIFA *World Cup* U-20 2023 semula direncanakan berlangsung di enam provinsi, termasuk Bali dan Jawa Tengah yang telah menyiapkan Stadion Kapten I Wayan Dipta dan Stadion Manahan. Namun pelaksanaan agenda ini menghadapi kendala serius setelah kedua kepala daerah, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster, secara vokal menyatakan penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel di wilayah masing-masing (CNN Indonesia, 2023d). Penolakan ini disampaikan secara tegas melalui surat resmi yang menyatakan penolakan kepada Kemenpora pada 14 Maret 2023 (CNN Indonesia, 2023b). Hal ini menjadi sorotan publik terutama karena alasan yang mereka kemukakan berakar pada isu ideologi negara, keamanan, serta solidaritas terhadap Palestina (Radhiansyah et al., 2023). Potensi kehadiran Israel menimbulkan gelombang penolakan di dalam negeri. Aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah, termasuk di sekitar Patung Kuda, Jakarta, dengan ratusan massa yang mengekspresikan ketidaksetujuan mereka (CNN Indonesia, 2023d). Penolakan ini erat kaitannya dengan posisi Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Sentimen konflik Israel-Palestina menjadi katalisator utama dari gelombang aksi ini (Maulana, 2023).

Sikap kedua kepala daerah tersebut menarik perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Sejumlah organisasi masyarakat dan partai politik menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut, diantaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Indonesia *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C), *Aqsa Working Group* (AWG), *Boycott, Divestment, and Sanction* (BDS) Indonesia, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISIDI), Front Persaudaraan Islam (FPI), Persatuan Alumni 212, serta Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) (Pratyaksa & Putri, 2023). Palestina dan konsistensi terhadap konstitusi negara menjadi tema sentral yang melatari sikap ini (Fauziah, 2023). Penolakan dari dalam negeri menempatkan pemerintah dalam posisi dilematis antara memenuhi komitmen internasional sebagai tuan rumah FIFA *World Cup* U-20 2023 atau mengakomodasi aspirasi domestik yang kuat. Meskipun

secara formal kewenangan hubungan luar negeri berada di tangan pemerintah pusat, intervensi aktor subnasional dalam kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kebijakan luar negeri Indonesia juga dipengaruhi oleh peran aktor-aktor subnasional (Radhiansyah et al., 2023).

Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan olahraga sebaiknya dipisahkan dari ranah politik. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus menghormati aturan FIFA demi menjaga kredibilitas internasional serta kehadiran Israel sebagai peserta tidak akan mengubah komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina (Kementerian Sekretariat Negara, 2023). Pernyataan ini ditujukan sebagai upaya pemerintah pusat untuk menyeimbangkan posisi antara tanggung jawab sebagai tuan rumah turnamen dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan anti-kolonialisme.

Pada 29 Maret 2023, FIFA secara resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah (Inside FIFA, 2023). Melalui pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kondisi yang belum memungkinkan terselenggaranya turnamen sesuai prinsip organisasi (Inside FIFA, 2023). Beberapa media internasional seperti BBC (BBC Sport, 2023) dan The Guardian (The Guardian, 2023) mencatat bahwa keputusan ini menandai adanya perbedaan pandangan domestik yang memengaruhi pelaksanaan ajang olahraga global.

Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penolakan pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah terhadap kehadiran Israel dapat dipahami sebagai praktik paradiplomasi. Keterlibatan kedua gubernur menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki peran politik dalam mengekspresikan nilai-nilai moral dan ideologis yang berkembang di masyarakatnya. Dalam kasus ini, tindakan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik oleh aktor subnasional yang merefleksikan nilai-nilai nasional sekaligus aspirasi publik tingkat lokal. Melalui perspektif paradiplomasi, penelitian ini berupaya memahami bentuk tindakan tersebut, landasan politik dan ideologinya, serta hubungan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional dalam kerangka diplomasi Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah FIFA *World Cup* U-20 pada tanggal 24 Oktober 2019 yang diumumkan setelah FIFA menggelar *general meeting* di Shanghai, Tiongkok. Sayangnya Indonesia harus kehilangan peluang ini lantaran FIFA mengeluarkan pengumuman terkait pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah *World Cup* U-20 tahun 2023. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh penolakan dari Gubernur Bali dan Jawa Tengah dimana kedua provinsi tersebut menjadi tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penolakan juga didukung oleh berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi massa, lembaga keagamaan, hingga partai politik yang menolak partisipasi Timnas Israel yang didasari solidaritas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan identitas antikolonialisme yang berujung memunculkan tekanan politik terhadap pemerintah pusat.

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah munculnya aktor subnasional yang menolak kehadiran Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 hingga memicu perbedaan antara kepentingan lokal dan komitmen internasional Indonesia. Di saat pemerintah pusat telah menyepakati penyelenggaraan turnamen bersama FIFA, kepala daerah Bali dan Jawa Tengah secara terbuka menyuarakan penolakan berdasarkan pertimbangan ideologis dan solidaritas politik terhadap Palestina. Situasi ini memperlihatkan bahwa aktor subnasional tidak lagi bersifat pasif, melainkan dapat menjadi kekuatan politik yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri secara *de facto*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktor subnasional di Indonesia khususnya Gubernur Bali dan Jawa Tengah dalam merespon isu kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023.

Berdasarkan situasi tersebut, penulis berusaha menjawab pertanyaan dari “*Bagaimana paradiplomasi Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah dalam menolak kehadiran Timnas Israel pada FIFA World Cup U-20 tahun 2023 di Indonesia?*”

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk penolakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah terhadap isu kehadiran Timnas Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia.
2. Menganalisis penolakan tersebut sebagai bentuk paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional dalam konteks hubungan internasional.
3. Menjelaskan bagaimana paradiplomasi dalam bentuk ekspresi politik lokal dari pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap isu keikutsertaan Israel.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dari sisi akademik: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman tentang bagaimana aktor subnasional Indonesia merespon isu kehadiran Israel pada FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia.
- b. Dari sisi kebijakan: Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi pusat–daerah dalam isu internasional. Temuan penelitian diharapkan dapat membantu merumuskan pedoman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi benturan kebijakan seperti dalam isu penolakan kehadiran Timnas Israel.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada studi-studi sebelumnya sebagai referensi untuk memperluas wawasan dan mendapatkan informasi yang berguna dalam melaksanakan penelitian. Dengan melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu, penulis dapat mengaitkan temuan-temuan sebelumnya dengan topik yang sedang diteliti, sehingga penelitian ini dapat mengisi kekosongan atau aspek yang belum terungkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Fitriisia Munir, Rendi Prayuda, dan Artha Yudilla (2024). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi kasus serta dikaji dengan menekankan peran aktor subnasional dalam memperkuat posisi ekonomi daerah melalui kerjasama internasional. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana aktor subnasional di Kepulauan Riau terlibat dalam kolaborasi lintas batas untuk meningkatkan daya saing global wilayah tersebut. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pemerintah daerah di Kepulauan Riau aktif menjalin kerja sama dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan infrastruktur. Output kerja sama berupa pembangunan kawasan industri bersama, pengembangan pariwisata, dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa aktor subnasional dapat memainkan peran strategis dalam hubungan internasional, terutama dalam konteks ekonomi regional (Munir et al., 2024).

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Haritsa Shafiyah, Gilang Nur Alam, dan R.M.T. Nurhasan Affandi (2022). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kabupaten Garut menjalin hubungan luar negeri dengan Damyang-gun di Korea Selatan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kerja sama antara Garut dan Damyang-gun mencakup pertukaran budaya, pendidikan, dan teknologi dibidang pertanian. Melalui program ini, Garut berhasil mengadopsi teknik pertanian modern dari Korea Selatan hingga berhasil meningkatkan produktivitas hasil petani lokal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa meskipun berada di bawah regulasi pemerintah pusat, aktor subnasional memiliki ruang untuk berinovasi dan membangun hubungan internasional yang bermanfaat bagi pembangunan daerah (Shafiyah et al., 2022)

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Marcel T. J Kok dan Kathrin Ludwig (2022). Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini berfokus untuk meneliti kontribusi aktor non-negara dan subnasional terhadap kerangka kerja keanekaragaman hayati global pasca-2020, serta bagaimana mereka dapat mendukung implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Penelitian ini menemukan bahwa ICIs memainkan peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati melalui berbagai fungsi tata kelola seperti menetapkan standar dan komitmen, kegiatan operasional, akuntabilitas, penyebaran informasi dan jaringan, serta pembiayaan. Kota-kota dan organisasi masyarakat sipil berkontribusi dalam menerapkan standar konservasi lokal, menjalankan proyek restorasi ekosistem, dan menyediakan data pemantauan keanekaragaman hayati. Mereka juga berperan untuk membangun jaringan kerja sama yang memperkuat kapasitas lokal dan mendorong adopsi praktik terbaik. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa keterlibatan aktor non-negara dan subnasional dapat mempercepat pencapaian target keanekaragaman hayati global, terutama dengan mengisi kesenjangan yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah nasional (Kok & Ludwig, 2022).

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ohio Omiunu (2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan studi kasus pada dua negara federasi, yaitu Belgia dan Kanada. Penelitian ini membahas tentang bagaimana

aktor subnasional di Belgia dan Kanada terlibat dalam proses negosiasi dan implementasi perjanjian perdagangan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kedua negara, aktor subnasional memainkan peran penting dalam menyuarakan kepentingan lokal dalam negosiasi perdagangan internasional. Di Kanada, provinsi seperti Quebec dan British Columbia aktif terlibat dalam perundingan perdagangan bebas seperti CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) dengan Uni Eropa. Mereka tidak hanya menjadi mitra konsultasi, tetapi juga memiliki hak veto dalam beberapa bidang kompetensi eksklusif. Sementara di Belgia, komunitas Flanders dan Wallonia memiliki otoritas hukum yang kuat dalam kebijakan perdagangan, sehingga sering kali menjadi aktor kunci dalam ratifikasi perjanjian internasional. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktor subnasional tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan luar negeri, tetapi bisa menjadi aktor politik strategis dalam proses internasional yang kompleks (Omiunu, 2017).

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Gustav Sundqvist dan Bjorn Jerden (2024). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen resmi, laporan media, serta korespondensi dan wawancara dengan para pengambil keputusan lokal di Swedia. Penelitian ini berangkat dari konsep paradiplomasi, namun mengkritik dominasi pendekatan rasionalis dan menawarkan perspektif konstruktivis untuk memahami keputusan aktor subnasional. Penelitian ini berfokus pada fenomena "*local decoupling*" atau pemutusan hubungan kerjasama antara pemerintah lokal Swedia dan Tiongkok sejak akhir 2010-an. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penurunan hubungan tersebut tidak didorong oleh pertimbangan ekonomi, tetapi dipengaruhi oleh memburuknya hubungan bilateral Swedia-Tiongkok, meningkatnya perhatian terhadap isu hak asasi manusia di Tiongkok serta rendahnya aktivitas konkret dalam program kerja sama. Hasil studi ini mengaskan bahwa paradiplomasi tidak selalu bersifat kooperatif; dalam kondisi tertentu, nilai politik lokal dan persepsi moral dapat memicu aksi disengagement yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa dinamika paradiplomasi sangat dipengaruhi konstruksi identitas dan nilai lokal, bukan semata kalkulasi material (Sundqvist & Jerdén, 2024).

Penelitian terdahulu secara garis besar memiliki kemiripan satu sama lain yaitu berfokus pada keterlibatan aktor subnasional dalam konteks hubungan internasional. Jurnal-jurnal tersebut secara konsisten menggambarkan bagaimana hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh aktor negara (*state-centric*), tetapi juga melibatkan aktor lokal dengan kepentingan, nilai, dan strategi mereka sendiri. Kesamaan utama yang ditemukan adalah penggunaan kerangka teori yang menyoroti keterlibatan subnasional dalam diplomasi luar negeri (*city diplomacy*), paradiplomasi, serta transgovernmentalism. Sebagian besar penelitian tersebut juga menekankan pentingnya peran lokal dalam mendukung tujuan global serta memperkuat diplomasi nasional dari bawah.

Keterbaruan penelitian yang akan diangkat oleh penulis terletak pada konteks yang lebih spesifik dan aktual, yaitu respon aktor subnasional Indonesia terhadap kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus terhadap dimensi paradiplomasi yang jarang ditonjolkan dalam kajian di Indonesia, yakni paradiplomasi sebagai ekspresi politik resistif. Selama ini, penelitian mengenai paradiplomasi umumnya menitikberatkan pada kerja sama ekonomi, pembangunan daerah, atau hubungan budaya lintas batas sebagai kontribusi daerah terhadap diplomasi nasional. Namun, penelitian ini secara spesifik menelaah bagaimana pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah mengekspresikan penolakan terhadap kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 sebagai bentuk paradiplomasi yang tidak mendukung, tetapi justru menentang kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai hubungan pusat–daerah dalam konteks paradiplomasi, sekaligus memperlihatkan bagaimana isu ideologi, identitas politik, dan solidaritas internasional dapat mendorong aktor subnasional untuk mengambil sikap resistif terhadap kebijakan luar negeri negara.

2.2 Landasan Analitis

2.2.1 Paradiplomasi

Dalam lanskap hubungan internasional kontemporer, telah muncul sebuah fenomena menarik yang mengubah pemahaman tradisional tentang diplomasi. Menurut Alexander S. Kuznetsov (2015), paradiplomasi merupakan fenomena

dinamis dan multidimensional dalam studi hubungan internasional yang menyoroti keterlibatan pemerintah pada tingkatan di bawah pemerintah pusat atau dapat disebut subnasional yang meliputi negara bagian, provinsi, wilayah otonom, maupun kota yang berjalan seiring dengan jalur diplomasi nasional yang resmi (Kuznetsov, 2015). Dalam tulisan yang lebih baru dari Noe Cornago (2018), terdapat penjelasan yang lebih luas tentang paradiplomasi. Cornago menyebutkan bahwa paradiplomasi merupakan keterlibatan pemerintah non-sentral dalam hubungan internasional melalui berbagai bentuk interaksi formal maupun informal dengan pihak asing. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran sosial, ekonomi, dan budaya, sejauh diizinkan oleh kewenangan konstitusional yang mereka miliki (Cornago, 2018).

Kemunculan paradiplomasi dapat dilacak dari dua sumber dorongan yang saling melengkapi. Pertama, dorongan domestik yang berasal dari proses desentralisasi kekuasaan, ekspansi otonomi daerah, dan artikulasi identitas politik regional yang semakin vokal. Kedua, dorongan eksternal yang bersumber dari dinamika globalisasi, integrasi ekonomi lintas negara, serta keberadaan organisasi-organisasi multilateral seperti Uni Eropa yang menciptakan peluang dan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinteraksi langsung dalam forum internasional. Selama dua puluh tahun terakhir, para akademisi telah mencurahkan perhatian besar untuk memahami apa yang mendorong pemerintah regional terjun ke arena internasional. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu, mulai dari gelombang globalisasi yang menghapus batas-batas ekonomi tradisional, proses integrasi kawasan seperti yang terjadi di Uni Eropa, hingga kebijakan desentralisasi politik yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah. Tidak kalah pentingnya adalah dorongan dari dalam berupa sentimen nasionalisme regional yang ingin mengekspresikan identitas unik mereka di kancah dunia (Lecours, 2008).

Konsep paradiplomasi menggeser paradigma *state-centric* dalam studi hubungan internasional dengan memberikan ruang pada keterlibatan aktor non-negara, khususnya dari tingkat lokal. Cornago (2010) juga menyebut bahwa paradiplomasi adalah:

"systematic, sustained and goal-oriented foreign relations conducted by subnational governments in fields ranging from economic development to cultural exchange"

yang artinya daerah tidak hanya berperan pasif, melainkan secara aktif membentuk interaksi lintas batas sesuai dengan kepentingan lokalnya (Cornago, 2010). Pemerintah daerah juga dapat menyuarakan nilai-nilai, ideologi, dan solidaritas lintas negara melalui pendekatan ini (Cornago, 2010). Oleh karena itu, paradiplomasi juga bisa dipahami sebagai perwujudan identitas politik lokal, yang dapat tercermin dalam bentuk diplomasi simbolik maupun normatif (Cornago, 2010). Bahkan menurut Soldatos (1990), paradiplomasi bisa terjadi dalam bentuk kerja sama, berjalan seiring, atau bahkan bertentangan dengan arah kebijakan luar negeri pemerintah pusat (Soldatos, 1990).

Untuk memahami kompleksitas paradiplomasi, André Lecours mengajukan kerangka analitis yang membagi fenomena ini ke dalam tiga lapisan atau dimensi yang saling terkait. Lapisan pertama adalah paradiplomasi ekonomi, yaitu dimana aktivitas internasional pemerintah daerah berfokus pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi regional mereka. Ini mencakup berbagai strategi seperti mempromosikan wilayah mereka sebagai destinasi investasi asing yang menarik, memfasilitasi akses ke pasar ekspor internasional, berpartisipasi aktif dalam pameran-pameran dagang global, atau bahkan membuka kantor representasi ekonomi di negara-negara target. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal melalui integrasi yang lebih dalam dengan ekonomi global.

Lapisan kedua ialah paradiplomasi kerja sama, yang meliputi interaksi internasional di bidang budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan bantuan teknis. Bentuk ini memperlihatkan peran aktor subnasional dalam *decentralized cooperation*, di mana kerja sama dilakukan melalui kemitraan akademik, pertukaran budaya, ataupun bantuan pembangunan lintas wilayah. Manifestasi konkretnya sering terlihat dalam program-program seperti *sister city* atau *sister province*, pembentukan jaringan kerja sama regional yang melintasi batas negara, atau pertukaran pelajar dan tenaga ahli. Paradiplomasi pada lapisan ini menegaskan

bahwa peran internasional aktor subnasional tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup diplomasi kultural dan sosial.

Lapisan ketiga adalah yang paling sensitif dan kompleks yaitu dimensi paradiplomasi politik. Pada lapisan ini, aktivitas internasional dilakukan oleh aktor subnasional untuk menegaskan identitas politik, membedakan diri dari negara pusat, bahkan dalam beberapa kasus, menantang legitimasi kebijakan luar negeri nasional. Paradiplomasi politik kerap muncul di wilayah dengan identitas nasional yang kuat seperti Quebec di Kanada, Catalonia di Spanyol, atau Flanders di Belgia, yang menggunakan hubungan internasional sebagai sarana artikulasi identitas dan perlawanan terhadap dominasi pusat (Lecours, 2008). Stéphane Paquin bahkan menyebut fenomena ini sebagai *identity paradiplomacy*, karena inti dari aktivitas tersebut adalah penegasan identitas politik yang khas. Dalam konteks tertentu, paradiplomasi politik berfungsi sebagai sarana resistensi terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama ketika kepentingan dan aspirasi lokal tidak terakomodasi dalam agenda diplomasi nasional.

Paradiplomasi bukan hanya soal ekonomi atau kerja sama teknis. Bagi wilayah dengan identitas politik yang kuat, paradiplomasi juga berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan identitas mereka di panggung internasional. Hal ini penting terutama ketika identitas lokal berbeda atau bahkan bertentangan dengan identitas nasional yang diproyeksikan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sering merasa bahwa kepentingan dan identitas mereka tidak terwakili dengan baik dalam diplomasi nasional. Diplomasi nasional biasanya mencerminkan kepentingan mayoritas atau kelompok dominan. Bagi komunitas dengan identitas berbeda, terutama di negara multinasional, ini menciptakan kesenjangan representasi. Paradiplomasi muncul sebagai cara untuk mengisi kesenjangan tersebut (Lecours, 2008).

Di wilayah dengan gerakan nasionalis yang kuat, paradiplomasi bahkan bisa menjadi alat resistensi politik. Dengan membangun hubungan langsung dengan aktor internasional, pemerintah daerah berusaha mendapat legitimasi internasional untuk aspirasi politik mereka. Dalam kasus ekstrem, paradiplomasi bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju kemerdekaan atau setidaknya negosiasi ulang hubungan dengan pemerintah pusat. Namun tidak semua paradiplomasi

bersifat konfrontatif atau separatistis. Sering kali paradiplomasi justru menjadi katup pengaman yang memungkinkan komunitas regional mengekspresikan identitas unik mereka tanpa harus memisahkan diri. Ini relevan untuk negara multinasional, di mana pengakuan terhadap keberagaman identitas penting untuk stabilitas nasional (Lecours, 2008).

Pemilihan konsep paradiplomasi dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya untuk menjelaskan keterlibatan aktor subnasional dalam isu internasional. Paradiplomasi memberikan kerangka analitis yang memungkinkan untuk memahami bagaimana pemerintah provinsi yang meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam politik luar negeri, tetap dapat berperan dalam dinamika internasional melalui tindakan yang memiliki implikasi diplomatik. Dalam literatur klasik, paradiplomasi kerap dipahami sebagai kerja sama lintas batas dalam bidang ekonomi, budaya, atau pembangunan daerah. Namun, pengertian ini menjadi tidak memadai ketika berhadapan dengan kasus penolakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah.

Sejalan dengan argumen Lecours (2008), paradiplomasi tidak hanya terbatas pada saluran kerja sama, tetapi juga dapat hadir sebagai ekspresi politik yang bahkan bersifat resistif. Paradiplomasi politik muncul ketika aktor subnasional menggunakan kewenangan administratif atau simbolik mereka untuk mengekspresikan identitas politik, ideologi, atau resistensi terhadap kebijakan pusat. Perspektif inilah yang membuat konsep paradiplomasi menjadi relevan dalam menganalisis sikap pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah. Tindakan mereka tidak dimaksudkan untuk membuka hubungan kerja sama internasional, melainkan untuk menyuarakan posisi politik daerah terhadap kehadiran Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 yang direncanakan akan digelar di Indonesia.

Paradiplomasi dalam literatur tidak hanya dipahami sebagai aktivitas kerja sama luar negeri yang bersifat ekonomi atau pembangunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi politik yang dilakukan oleh aktor subnasional. Lecours (2008) menjelaskan bahwa paradiplomasi dapat muncul sebagai artikulasi identitas lokal, nilai ideologis, atau aspirasi politik masyarakat daerah dalam merespon isu internasional. Dalam isu ini, paradiplomasi memungkinkan pemerintah daerah mengekspresikan preferensi politik tertentu meskipun kewenangan hubungan luar

negeri secara formal berada pada pemerintah pusat. Sejumlah studi lain juga menyoroti bahwa dalam konteks negara desentralisasi, paradiplomasi berpotensi menjadi ruang terjadinya perbedaan pandangan antara pusat dan daerah, terutama ketika isu internasional berkaitan dengan identitas politik, ideologi, atau nilai sejarah (Keating, 1999; Kuznetsov, 2015). Pemahaman ini memberikan dasar konseptual untuk melihat tindakan aktor subnasional sebagai bagian dari dinamika politik domestik yang berinteraksi dengan isu global.

2.2.2 Subnasional

Dalam perkembangan studi hubungan internasional dan politik kontemporer, konsep subnasional telah mengalami perkembangan seiring dengan transformasi politik global. Konsep subnasional merujuk pada entitas politik, administratif, sosial, atau geografis yang beroperasi di bawah tingkat negara-bangsa (*nation-state*) dalam hierarki struktur politik (Bache & Flinders, 2004). Entitas subnasional dapat dimaknai sebagai satuan politik dengan identitas mandiri, keperluan khusus, dan kemampuan beroperasi secara relatif mandiri dalam sistem yang lebih luas (Paquin & LaChappelle, 2005). Entitas ini memiliki otonomi dalam mengelola urusan publik lokal, tergantung pada sistem politik dan hukum yang berlaku di masing-masing negara (Börzel, 2002).

Dari sudut pandang formal, entitas subnasional merupakan unit politik-administratif dengan batasan yurisdiksi yang terperinci dalam kerangka negara, menikmati derajat otonomi tertentu yang terlindungi secara konstitusional atau hukum, memiliki badan pemerintahan tersendiri dengan hak pengambilan keputusan, serta mampu mengerahkan sumber daya dalam batas kewenangan yang dimiliki (Blair, 1988). Pemahaman ini menjadi krusial untuk menganalisis dinamika politik kontemporer dimana entitas subnasional tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat, namun juga tampil sebagai pemain politik dengan agenda dan kapabilitas aksi tersendiri (Blair, 1988). Rosenau (1990) melihat fenomena ini sebagai bagian dari pergeseran paradigma dalam politik global, dimana terjadi "fragmentasi" kekuatan negara yang memungkinkan munculnya "pelaku bebas" pada berbagai tingkatan, termasuk level subnasional (Rosenau, 1990). Sementara itu, Keating (1999) memperluas wawasan dengan menjelaskan

bahwa entitas subnasional tidak selalu bertindak sebagai kelompok seragam, melainkan menjadi arena persaingan berbagai kepentingan dan identitas yang rumit (Keating, 1999).

Di dalam struktur pemerintahan subnasional, terdapat sejumlah aktor penting yang memegang peran dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan struktur administratif, pelaku subnasional dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Di tingkat provinsi, pelaku subnasional meliputi gubernur dan staf eksekutif provinsi, DPRD Provinsi sebagai badan legislatif, serta dinas-dinas provinsi yang menjalankan tugas teknis pemerintahan. Di tingkat kabupaten/kota, pelaku-pelaku ini mencakup bupati/walikota beserta jajaran eksekutifnya, DPRD Kabupaten/Kota, dan dinas-dinas daerah tingkat kabupaten/kota. Klasifikasi lainnya mencakup satuan administratif khusus seperti wilayah dengan status otonomi khusus (misalnya Aceh dan Papua di Indonesia), daerah istimewa (seperti Yogyakarta), serta kawasan dengan status ekonomi atau administratif khusus (Cheema & Rondinelli, 2007).

Tatham (2010) mengembangkan pengelompokan yang lebih mendalam dengan membedakan pelaku subnasional berdasarkan kapasitas kelembagaan, legitimasi politik, dan sumber daya yang dimiliki. Ia menemukan bahwa tingkat otonomi resmi (*de jure*) tidak selalu berhubungan dengan kemampuan nyata (*de facto*) dari pelaku subnasional untuk mempengaruhi proses politik. Dalam beberapa kasus, entitas subnasional dengan otonomi resmi terbatas justru mampu menunjukkan tingkat aktivisme politik yang tinggi melalui mobilisasi jaringan dan sumber daya informal (Tatham, 2010).

Keterlibatan pelaku subnasional Indonesia dalam isu internasional telah mengalami kemajuan. Mukti (2013) mencatat bahwa pemerintah daerah Indonesia semakin aktif dalam menjalin kerjasama *sister city/province* dengan daerah di luar negeri, terutama untuk tujuan ekonomi dan pertukaran budaya (Mukti, 2013). Dalam beberapa kasus, pelaku subnasional Indonesia juga membuat pernyataan politik terkait isu-isu internasional sensitif, seperti yang terlihat dalam mobilisasi dukungan untuk Palestina atau penolakan terhadap kebijakan luar negeri tertentu (Fathun, 2016).

Dalam konteks keterlibatan aktor subnasional dalam merespon kehadiran Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia, konsep subnasional menyediakan kerangka analitis yang mendalam. Konsep subnasional digunakan dalam penelitian ini karena gubernur sebagai kepala daerah bukan hanya pelaksana teknis kebijakan. Gubernur juga memiliki kapasitas politik untuk mengambil sikap yang mewakili publik di daerahnya. Walaupun hubungan luar negeri adalah wewenang pemerintah pusat, otonomi daerah pasca reformasi membuat provinsi memiliki ruang untuk menyampaikan posisi politik, termasuk terhadap isu yang bersinggungan dengan dunia internasional (Said, 2015). Di titik inilah konsep subnasional menjelaskan kedudukan aktor, bukan sekadar menunjuk siapa pelakunya. Konsep ini melihat penggunaan otoritas daerah untuk mengekspresikan nilai politik yang hidup di masyarakat lokal. Dengan memakai konsep subnasional, peneliti dapat menjelaskan mengapa gubernur Bali dan Jawa Tengah mampu menjadi aktor yang bersuara dalam isu Israel meskipun tidak memiliki kewenangan diplomatik formal. Konsep ini memberi dasar teoritis bahwa tindakan mereka bukan sekadar kebijakan daerah, tetapi bentuk artikulasi politik subnasional yang muncul dari otonomi, legitimasi publik, serta identitas politik yang mereka wakili. Karena itu, konsep subnasional tidak hanya relevan tetapi justru menjadi fondasi penting agar posisi kedua gubernur dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki ruang aksi nyata dalam dinamika paradiplomasi resistif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti bertujuan untuk menguraikan permasalahan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana aktor subnasional merespon kehadiran Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023. Bagan kerangka pikir yang disusun dalam penelitian ini menunjukkan alur berpikir yang bergerak runtut dari peristiwa empiris menuju analisis teoritis. Penelitian bermula dari fakta bahwa Timnas Israel ditetapkan sebagai peserta FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia, yang kemudian memicu penolakan dari Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Penolakan tersebut menjadi titik awal untuk melihat bagaimana kepala daerah berperan bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang dapat menyatakan sikap terhadap isu internasional. Untuk membaca posisi tersebut,

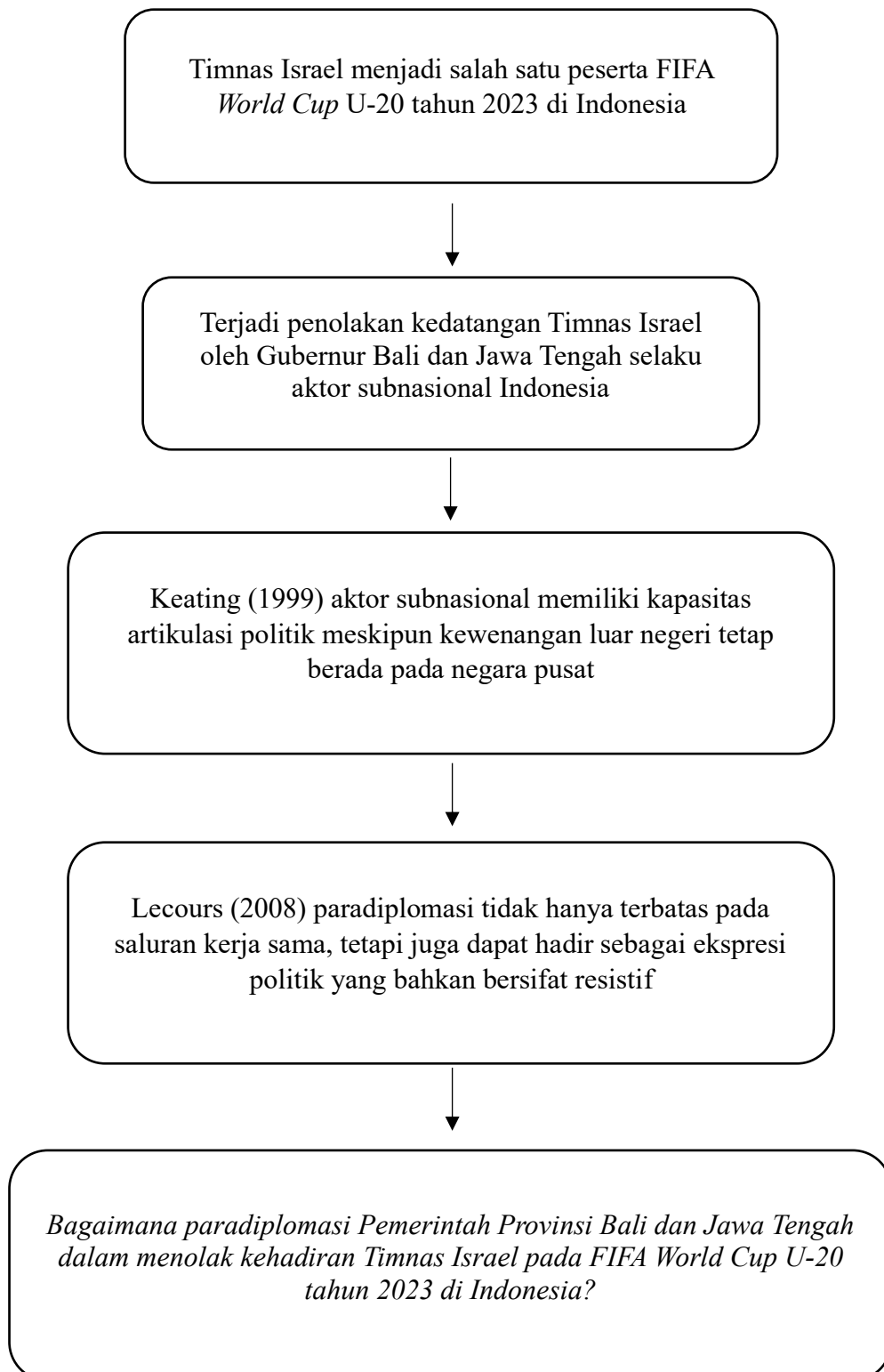
penelitian merujuk pada pandangan Keating (1999) yang menyebutkan bahwa aktor subnasional memiliki kapasitas artikulasi politik meskipun kewenangan hubungan luar negeri tetap berada di tangan pemerintah pusat. Artinya kepala daerah tetap memiliki ruang untuk menyampaikan sikap politik ketika isu tertentu dianggap berkaitan dengan aspirasi publik ataupun nilai yang mereka wakili.

Kerangka analisis kemudian diperdalam melalui konsep paradiplomasi yang dijelaskan oleh Lecours (2008) bahwa paradiplomasi tidak hanya berfungsi sebagai jalur kerja sama antarwilayah, tetapi juga dapat hadir sebagai ekspresi politik yang bahkan bersifat resistif. Penolakan kedua gubernur dapat dipahami bukan sebagai tindakan administratif biasa, melainkan bentuk artikulasi posisi politik daerah yang muncul karena adanya nilai dan kepentingan yang mereka anggap perlu dipertahankan. Bagan ini pada akhirnya mengarah pada rumusan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana paradiplomasi Pemerintah Provinsi Bali dan Jawa Tengah terlihat dalam upaya menolak kedatangan Timnas Israel pada FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 di Indonesia.

Kerangka ini tidak hanya menunjukkan alur hubungan antarvariabel tetapi juga memperlihatkan bahwa penelitian dibangun dari sebuah peristiwa, diperkuat oleh konsep subnasional sebagai dasar analisis aktor, kemudian ditautkan dengan konsep paradiplomasi untuk membaca bentuk respons politik daerah. Dengan alur seperti ini, penelitian memiliki landasan yang jelas dalam menelusuri bagaimana sikap daerah dapat muncul, bergerak, dan berimplikasi terhadap kebijakan nasional, sehingga kerangka pikir tidak hanya berfungsi sebagai bagan visual tetapi juga sebagai jalan penalaran yang mempertemukan konteks empiris dengan fondasi teoritis.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: diolah oleh penulis



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Kerangka metodologis yang menjadi landasan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Mengacu pada pemikiran Alan Bryman (2016), penelitian kualitatif merupakan praktik metodologis yang melibatkan berbagai lensa teoritis, strategi, dan teknik yang berfokus pada kualitas data yang dihasilkan untuk menginterpretasikan suatu fenomena sosial. Penelitian kualitatif berakar pada ilmu-ilmu sosial dan berkaitan dengan manusia dan realitas sosial. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik mendasar yaitu komitmennya untuk memahami kejadian, aksi, sistem nilai dan norma, dan manifestasi sosial lainnya dari sudut pandang subjek yang mengalami langsung fenomena tersebut (Bryman, 2016). Penelitian kualitatif tidak hanya sekedar mendeskripsikan, tetapi ikut merepresentasikan dan mengembangkan konsep dan teori berdasarkan data.

Penelitian kualitatif lazimnya menggunakan pendekatan studi kasus atau fenomena yang terdapat pada masyarakat sosial dimana metodologi ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek tersembunyi yang sulit diakses melalui pendekatan lain. Studi kasus dilakukan dengan menganalisis secara intensif terkait fenomena yang terjadi serta dinamika interaksi sosial yang menyertainya (Bryman, 2016). Penelitian ini berupaya memberi penyempurnaan ide yang membangun dan menghasilkan asumsi dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif yaitu lebih cenderung pada pernyataan-pernyataan dengan data deskriptif dan sebagian besar analisisnya bersifat interpretatif.

Penelitian kualitatif mampu menjelaskan terkait realitas dan fakta apa yang sebenarnya terjadi pada lingkup sosial (Bryman, 2016).

Dengan mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pemerintah provinsi Bali dan Jawa Tengah merespons isu kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 2023 di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelusuri tindakan, pernyataan, serta pertimbangan politik yang muncul di tingkat daerah secara lebih mendalam. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini tidak hanya memetakan bentuk respons yang terlihat di permukaan, tetapi juga menginterpretasikan alasan, nilai, dan konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, metodologi ini memberikan ruang untuk memahami dinamika paradiplomasi daerah secara lebih komprehensif, termasuk bagaimana sikap dan tindakan aktor subnasional berinteraksi dengan kebijakan pemerintah pusat dalam isu yang memiliki muatan ideologis dan sensitivitas politik yang tinggi.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menetapkan batasan fokus yang jelas dan terstruktur dalam beberapa dimensi. Batasan yang tetap dan terarah pada topik yang diteliti, sehingga penelitian tidak meluas atau terjebak dalam berbagai data yang tersedia. Secara temporal, penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2019-2023 yang mencakup periode sejak Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA *World Cup* U-20 hingga saat pencabutan status tuan rumah. Pembatasan waktu ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara komprehensif evolusi sikap dan respons yang terbentuk, mulai dari fase awal persiapan hingga eskalasi kontroversi yang berujung pada keputusan final FIFA. Dari perspektif subjek penelitian, penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada dua entitas subnasional yaitu Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah.

Dengan pembatasan fokus ini, peneliti dapat menghindari ekspansi diskursus yang berlebihan dan mempertahankan koherensi argumentatif di

tengah kompleksitas data yang tersedia, sekaligus memastikan kedalaman analisis terhadap dinamika yang terjadi pada entitas subnasional yang dipilih dalam merespons isu sensitif keikutsertaan Israel dalam turnamen internasional di Indonesia.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama dalam proses pengumpulan informasi. Data sekunder dipilih karena karakteristik penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan politik berdasarkan dokumen serta fakta yang telah tersedia. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media perantara yang kredibel, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memverifikasi, serta merekonstruksi dinamika kasus yang diteliti.

Sumber data utama mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta publikasi akademik lain yang relevan dengan tema paradiplomasi, hubungan pusat–daerah, dan kebijakan luar negeri Indonesia. Literatur tersebut berfungsi untuk membangun kerangka konseptual dan teoretis yang menjadi landasan analisis. Penelitian ini juga memanfaatkan dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, naskah pernyataan pejabat publik, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Dokumen-dokumen tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami dimensi administratif dan legal dari tindakan aktor subnasional.

Sumber data tambahan diperoleh melalui portal elektronik resmi yang memiliki otoritas institusional, seperti laman digital Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang menampilkan pernyataan Presiden dan pejabat pemerintah pusat, situs Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mendokumentasikan koordinasi penyelenggaraan turnamen, serta laman resmi *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) yang memuat keputusan dan regulasi terkait pelaksanaan FIFA World Cup U-20 2023. Data dari laman Persatuan Sepak

Bola Seluruh Indonesia (PSSI) turut digunakan untuk menelusuri posisi organisasi sepak bola nasional terhadap dinamika yang terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan informasi dari portal berita nasional yang memiliki rekam jejak kredibilitas tinggi seperti *Kompas*, *Detik*, *Tempo*, *CNN Indonesia*, dan *CNBC Indonesia*. Sumber-sumber ini berperan dalam melengkapi data kronologis dan memperkuat pemahaman terhadap konteks sosial-politik dari sikap pemerintah daerah maupun respon masyarakat. Meskipun bersifat media sekunder, informasi yang diperoleh dari portal berita diverifikasi dengan membandingkan beberapa sumber berbeda untuk menjaga keandalan data dan menghindari bias interpretatif.

Penggunaan data sekunder dari beragam sumber ini memungkinkan peneliti membangun rekonstruksi kronologis yang komprehensif mengenai perkembangan kasus penolakan kehadiran Timnas Israel pada *FIFA World Cup U-20 2023* di Indonesia. Melalui penelusuran data tersebut, penelitian ini dapat menelusuri bagaimana pernyataan resmi, kebijakan daerah, dan respons publik terbentuk serta berinteraksi satu sama lain dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, strategi pengumpulan data ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual, tetapi juga untuk memastikan validitas, konsistensi, dan keterhubungan antara data empiris dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang proses pengumpulan data, peneliti menggunakan dua teknik utama, studi literatur dan studi dokumen yaitu sebagai berikut:

a. Studi literatur

Peneliti menggunakan teknik studi literatur yaitu teknik pengumpulan data atau informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian serta memiliki kredibilitas seperti dari buku, jurnal, artikel, berita, serta media-media lainnya.

b. Studi dokumen

Teknik studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang akan mendukung peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen resmi kenegaraan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Peraturan Daerah, Surat Resmi dari Gubernur Bali serta dokumen organisasi internasional FIFA seperti Statuta FIFA akan menjadi beberapa yang digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diperlukan untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data berdasarkan panduan Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Kondensasi Data

Tahapan kondensasi data dilakukan dengan menyaring, meringkas, dan memilih poin-poin penting dari data yang diperoleh. Proses ini bertujuan untuk memperjelas dan memadatkan informasi dengan menghilangkan bagian-bagian yang tidak relevan atau tidak berhubungan dengan penelitian. Hasil dari kondensasi data memberikan peneliti gambaran yang lebih terstruktur dan mempermudah proses analisis data.

2. Penyajian data

Pada tahapan penyajian data, informasi yang telah diolah disusun secara sistematis dalam berbagai format seperti teks naratif, merupakan tahapan yang disajikan dalam berbentuk teks naratif, tabel, gambar, diagram, atau bagan. Penyajian data yang terorganisir dengan baik membantu peneliti memahami konteks informasi secara keseluruhan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan atau menentukan langkah selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam langkah ini, ini peneliti berupaya merumuskan kesimpulan atau membuat rangkuman akhir berdasarkan data yang telah diolah.

Kesimpulan ini dirancang untuk menjawab tujuan penelitian secara ringkas dan jelas, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian (Miles et al., 2014).

Dalam penelitian ini, penentuan data tidak dilakukan melalui skema koding seperti dalam *grounded theory*, melainkan melalui proses seleksi nilai–relevansi. Tahapan seleksi data dilakukan dengan cara membaca seluruh dokumen, berita, dan sumber akademik secara komprehensif kemudian memilah informasi yang memiliki keterhubungan langsung dengan fokus penelitian. Relevansi data ditentukan melalui tiga indikator: keterkaitan dengan aktor (Gubernur Bali dan Jawa Tengah), keterhubungan dengan tindakan penolakan terhadap Israel, serta kontribusi terhadap analisis paradiplomasi. Sumber yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut tidak digunakan dalam pembahasan agar alur analisis tetap terarah dan tidak melebar ke isu-isu di luar fokus topik. Dengan cara ini, pemilihan data tetap objektif dan terukur karena setiap informasi yang masuk telah melalui proses pertimbangan tematik dan relevansi dengan konsep paradiplomasi dan aktor subnasional.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Isu penolakan kehadiran Timnas Israel dalam FIFA *World Cup* U-20 tahun 2023 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perpolitikan Indonesia. Penolakan ini tidak hanya mencerminkan dinamika diplomasi nasional, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aktor subnasional khususnya Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengambil peran aktif merespons isu internasional yang bermuatan ideologis dan politik.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana penolakan kedua gubernur tersebut dapat dipahami sebagai bentuk paradiplomasi, khususnya paradiplomasi resistif. Dengan menggunakan pendekatan teoretis tentang paradiplomasi sebagai ekspresi politik lokal, penelitian ini berusaha menelaah peran aktor subnasional dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan nilai ideologis bangsa ke dalam konteks hubungan internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk respon utama aktor subnasional: (1) aksi administratif berupa pengiriman surat langsung kepada pemerintah pusat, (2) pernyataan publik dan resmi yang menegaskan penolakan atas kehadiran Israel, serta (3) negosiasi vertikal dengan pemerintah pusat melalui mekanisme formal maupun tekanan opini publik. Ketiga bentuk tindakan ini memperlihatkan bahwa kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai administrator wilayah, melainkan juga sebagai aktor politik yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi isu internasional.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak

lahir secara spontan, melainkan berakar pada nilai dasar bangsa Indonesia. Pertama, penolakan tersebut selaras dengan prinsip anti-kolonialisme yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan telah menjadi identitas politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kedua, landasan konstitusional dan regulasi turunan, termasuk Permenlu No. 3 Tahun 2019, memberi pijakan normatif yang digunakan kepala daerah untuk memperkuat sikap mereka. Ketiga, penolakan tersebut juga dilandasi oleh solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah menjadi salah satu kebijakan luar negeri paling konsisten Indonesia dan memiliki resonansi kuat dalam masyarakat. Aksi kedua gubernur dapat dipahami sebagai bentuk paradiplomasi yang berfungsi sebagai saluran ekspresi politik lokal terhadap isu internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradiplomasi di Indonesia dapat berfungsi bukan hanya sebagai instrumen kerja sama, tetapi juga sebagai ekspresi politik lokal yang berakar pada ideologi, konstitusi, dan aspirasi masyarakat. Kasus Bali dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa paradiplomasi dapat hadir dalam bentuk resistif, menciptakan perbedaan dengan kebijakan pusat, namun sekaligus memperlihatkan bagaimana aktor subnasional memiliki peran signifikan dalam membentuk dinamika hubungan internasional Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat dijadikan saran. Pertama, pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi isu-isu internasional yang sensitif. Kasus penolakan terhadap Israel memperlihatkan bahwa lemahnya sinergi antara pusat dan daerah dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk hilangnya kesempatan diplomasi olahraga dan kerugian reputasi di kancah global. Mekanisme komunikasi yang lebih sistematis dibutuhkan agar aspirasi politik lokal tetap dapat diakomodasi tanpa harus mengorbankan komitmen internasional yang telah dibuat.

Kedua, pemerintah daerah sebagai aktor subnasional juga perlu memahami bahwa setiap tindakan yang diambil dalam isu internasional memiliki konsekuensi diplomatik yang lebih luas. Aspirasi lokal memang penting untuk diperjuangkan, namun perlu disalurkan melalui mekanisme dialog dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan fragmentasi kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, paradiplomasi resistif sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai perlawanan, tetapi juga sebagai peluang untuk menyuarakan nilai-nilai lokal dengan cara yang tetap menjaga keselarasan diplomasi nasional.

Ketiga, bagi kajian akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya melihat paradiplomasi tidak hanya dari sisi kooperatif tetapi juga dari sisi resistif dan politik. Studi serupa di masa depan dapat memperluas analisis pada kasus-kasus lain baik di Indonesia maupun di negara lain, sehingga memperkaya literatur mengenai peran aktor subnasional dalam hubungan internasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman bahwa paradiplomasi bukan sekadar kerja sama teknis lintas batas, melainkan juga arena artikulasi politik lokal yang mampu memengaruhi arah diplomasi nasional.

Dengan kesimpulan dan saran ini, penelitian menegaskan bahwa kasus penolakan Bali dan Jawa Tengah terhadap kehadiran Israel bukan sekadar isu olahraga, tetapi merupakan fenomena paradiplomasi politik yang memperlihatkan interaksi kompleks antara aspirasi lokal, landasan ideologis bangsa, dan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (1st ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781316756768>
- Aldecoa, F., & Keating, M. (Eds.). (1999). *Paradiplomacy in action: The foreign relations of subnational governments*. F. Cass.
- antaranews.com. (2018, September 13). *News Focus—Indonesia records two successes in Asian Games 2018*. Antara News.
<https://en.antaranews.com/news/118524/news-focus-indonesia-records-two-successes-in-asian-games-2018>
- Azani, N. S., & Zuhdi, M. L. (2017). Indonesia's support for Palestine in international forums. In I. R. Adi & R. Achwan, *Competition and Cooperation in Social and Political Sciences* (1st ed., pp. 339–345). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781315213620-41>
- Bache, I., & Flinders, M. (2004). *Multi-level Governance*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0199259259.001.0001>
- BBC Sport. (2023, March 29). Fifa: Indonesia stripped of right to host Under-20 World Cup. *BBC Sport*. <https://www.bbc.com/sport/football/65113802>
- Blair, G. S. (1988). *Exploring Federalism*. Daniel J. Elazar. *The Journal of Politics*, 50(2), 530–532. <https://doi.org/10.2307/2131811>

- Boin, A., Hart, P. 't, Stern, E., & Sundelius, B. (2017). *The politics of crisis management: Public leadership under pressure* (Second edition, first published). Cambridge University Press.
- Börzel, T. A. (2002). *States and regions in the European Union: Institutional adaptation in Germany and Spain*. Cambridge University Press.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (Fifth Edition). Oxford University Press.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (Eds.). (2007). *Decentralizing governance: Emerging concepts and practices*. Ash Institute for Democratic Governance and Innovation, John F. Kennedy School of Government, Harvard University ; Brookings Institution Press.
- CNN Indonesia. (2023a). *Ganjar Tolak Timnas Israel Berlaga di Piala Dunia U-20 Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230324045510-142-928678/ganjar-tolak-timnas-israel-berlaga-di-piala-dunia-u-20-indonesia>
- CNN Indonesia. (2023b). *Gubernur Koster Kirim Surat Tolak Timnas Israel U-20 Tanding di Bali*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321095104-20-927620/gubernur-koster-kirim-surat-tolak-timnas-israel-u-20-tanding-di-bali?utm_source=chatgpt.com
- CNN Indonesia. (2023c). *Isi Lengkap Surat Gubernur Koster Tolak Timnas Israel Tanding di Bali*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321133805-20-927789/isi-lengkap-surat-gubernur-koster-tolak-timnas-israel-tanding-di-bali>
- CNN Indonesia. (2023d). *Kronologi Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023*. <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230329224324-142-931049/kronologi-indonesia-batal-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-2023>
- CNN Indonesia. (2023e). *Menpora Respons Gubernur Bali Tolak Israel: Masih Koma, Belum Titik*.

https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20230321201501-142-928069/menpora-respons-gubernur-bali-tolak-israel-masih-koma-belum-titik?utm_source=chatgpt.com

Cornago, N. (2010). On the Normalization of Sub-State Diplomacy. *The Hague Journal of Diplomacy*, 5(1–2), 11–36. <https://doi.org/10.1163/1871191x-05010102>

Cornago, N. (2018). Paradiplomacy and Protodiplomacy. In G. Martel (Ed.), *The Encyclopedia of Diplomacy* (1st ed., pp. 1–8). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0211>

Criekemans, D. (2010). *Regional Sub-State Diplomacy Today*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004183575.i-210>

Duchacek, I. D. (1984). The International Dimension of Subnational Self-Government. *Publius: The Journal of Federalism*. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pubjof.a037513>

Fajriyah, N., & Setiawati, S. M. (2025). Indonesia's View: Eradicating Colonialism and Supporting Palestine. *Global South Review*, 7(1), 139. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.96776>

Fathun, L. M. (2016). Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), 75–94.

Fauziah, T. (2023, March 31). *Daftar Partai Politik Tolak Israel di Piala Dunia U20 Indonesia*. *tirto.id*. <https://tirto.id/daftar-partai-politik-tolak-israel-di-piala-dunia-u20-indonesia-gEkr>

Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2018). *The Public Administration Theory Primer* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429494369>

Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6268>

Inside FIFA. (2019, July 5). *Five bids confirmed in race to host FIFA U-20 World Cup 2021*. <https://inside.fifa.com/tournaments/mens/u20worldcup/fifa-u-20-world-cup-poland-2019/media-releases/origin1904-p.cxm.fifa.com/five-bids-confirmed-in-race-to-host-fifa-u-20-world-cup-2021>

Inside FIFA. (2023, March 29). *FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023TM*. <https://inside.fifa.com/about-fifa/organisation/media-releases/origin1904-p.cxm.fifa.com/fifa-removes-indonesia-as-host-of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm>

Keating, M. (1999). Regions and international affairs: Motives, opportunities and strategies. *Regional & Federal Studies*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13597569908421068>

Kemenpora Republik Indonesia. (2023). *Terkait Surat Gubernur Bali Tolak Timnas Israel di Piala Dunia U-20, Plt Menpora Sudah Lakukan Komunikasi dan Diskusi untuk Mencari Titik Temu*. <https://deputi3.kemenpora.go.id/detail/155/terkait-surat-gubernur-bali-tolak-timnas-israel-di-piala-dunia-u-20-plt-menpora-sudah-lakukan-komunikasi-dan-diskusi-untuk-mencari-titik-temu>

Kementerian Sekretariat Negara. (2023). *Soal Piala Dunia U20, Presiden: Jangan Campur Aduk Olahraga dengan Politik | Sekretariat Negara*. https://www.setneg.go.id/baca/index/soal_piala_dunia_u20_presiden_jangan_campur_aduk_olahraga_dengan_politik

Kok, M. T. J., & Ludwig, K. (2022). Understanding international non-state and subnational actors for biodiversity and their possible contributions to the post-2020 CBD global biodiversity framework: Insights from six international cooperative initiatives. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 22(1), 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10784-021-09547-2>

Kristiyanto, H., & Hanief, A. (2022). Ideological Strengthening, Strategic Leadership, and Depersonalization: The Transformation of The Indonesian

- Democratic Party of Struggle 1999-2019. *CosmoGov*, 8(1), 46.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v8i1.38447>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- Lecours, A. (2008). *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*. Brill.
- Lukman, M. Z. (2023). Indonesia's Foreign Policy Post-Reform in the United Nations Security Council. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i2.666>
- McNair, B. (2018). *An introduction to political communication* (Sixth Edition). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*.
- Munir, F., Prayuda, R., & Yudilla, A. (2024). Sub National Collaboration In Increasing Global Competitiveness: Existence For Actors Cross-Border In Riau Islands. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 210. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.210-216>
- Omiunu, O. (2017). The Evolving Role of Sub-national Actors in International Trade Interactions: A Comparative Analysis of Belgium and Canada. *Global Journal of Comparative Law*, 6(2), 105–137.
<https://doi.org/10.1163/2211906X-00602001>
- Paquin, S., & LaChappelle, G. (Eds.). (2005). *Mastering Globalization* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203086865>
- Peraturan Menteri Luar Negeri*. (2019).

- Pratyaksa, I. G. T., & Putri, N. L. W. E. (2023). Analisis Framing Kebijakan Gubernur Bali Dalam Pembatalan Drawing Piala Dunia U-20. *SAMVADA*, 2(1).
- Purwanto, N. E., Budiasa, M., & Roring, F. P. (2023). Analisa Wacana Kritis Pernyataan Penolakan Israel oleh Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali Pada Pemberitaan Media Daring Kompas.id Periode Maret 2023. *Jurnal Communitarian*, 5(1), 765–783.
- Radhiansyah, E., Jovian, D., & Leonita, S. Z. (2023). Analisis Kewenangan Fifa atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023. *Journal of Political Issues*, 5(1), 16–34.
- Rosenau, J. N. (1990). *Turbulence in world politics: A theory of change and continuity*. Princeton University Press.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2021). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (9th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003198116>
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat—Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018, June 15). Indonesia Supports UN Resolution on Palestinian Civilian Protection. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/en/indonesia-supports-un-resolution-on-palestinian-civilian-protection/>
- Setiawati, S. M. (2024). The role of Indonesian government in middle east conflict resolution: Consistent diplomacy or strategic shifts? *Frontiers in Political Science*, 6, 1304108. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304108>
- Shafiyah, H., Alam, G. N., & Affandi, R. M. T. N. (2022). Hubungan Luar Negeri Aktor Subnasional: Kasus Kabupaten Garut di Indonesia dan Damyang-gun di Korea Selatan. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 219–240. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.12805>

- Soldatos, P. (1990). An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-policy Actors. In H. J. Michelmann & P. Y. Soldatos (Eds.), *Federalism and International Relations* (pp. 34–53). Oxford University Press/Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198274919.003.0002>
- Srikandi, T. A. (2022). *Faktor Pendorong Indonesia dalam Pengajuan Tuan Rumah FIFA WORLD CUP U-20 2021*. Universitas Sriwijaya.
- Sundqvist, G., & Jerdén, B. (2024). Paradiplomacy and international conflict: Disengagement from China by Swedish local governments. *Asia Europe Journal*, 22(3), 313–332. <https://doi.org/10.1007/s10308-024-00703-2>
- Tatham, M. (2010). ‘With or without you’? Revisiting territorial state-bypassing in EU interest representation. *Journal of European Public Policy*, 17(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13501760903465082>
- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and states as global players*. Oxford University Press.
- The Guardian. (2023, March 29). Fifa removes Indonesia as host of 2023 Under-20 World Cup amid Israel row. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/football/2023/mar/29/fifa-strips-indonesia-of-the-right-to-host-footballs-under-20-world-cup>
- Tumanggor, F. A. (2023). *Penolakan Israel, Pembatalan Piala Dunia U-20, dan Kepentingan Nasional*. detiknews. <https://news.detik.com/kolom/d-6648400/penolakan-israel-pembatalan-piala-dunia-u-20-dan-kepentingan-nasional>
- Undang-Undang No. 23*. (2014).
- Undang-Undang No. 37*. (1999).